

Cari



Selayang Pandang

Sabtu, 24 Maret 2012 - 10:03

Tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP).

Organisasi DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 32.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Segepan sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin berat.

Tugas Unit dan Jabatan di Kantor Pusat DJP:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal
Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan DJP.
2. Direktorat Peraturan Perpajakan I
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN dan PPhBM, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan PBB dan BPHTB.
3. Direktorat Peraturan Perpajakan II
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan.
5. Direktorat Penegakan Hukum
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.
6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
7. Direktorat Keberatan dan Banding
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.
8. Direktorat Potensi, Kepatuhan & Penerimaan Perpajakan
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.
10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.
11. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
12. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
14. Direktorat Perpajakan Internasional
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.
15. Direktorat Intelijen Perpajakan
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.
16. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak
Mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
17. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum Perpajakan
Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
18. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan & Penertiban Sumber Daya Manusia
Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
19. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini dapat dibedakan atas:

- Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
- Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Jumlah Kanwil DJP sebanyak 33 unit.

Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak.

Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

- KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
- KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
- KPP Pratama, menangani wajib pajak lokasi.

Jumlah KPP Wajib Pajak Besar sebanyak 4 unit, KPP Madya 19 unit, dan KPP Pratama sebanyak 309 unit.

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh KPP maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit KP2KP. Jumlah KP2KP sebanyak 207 unit.

Unit pelaksana teknis (UPT) DJP saat ini adalah PPDDP dan KPDDP. Unit yang berlokasi di Jakarta ini mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi perpajakan. KPDDP mempunyai tugas yang sama, saat ini DJP mempunyai 2 unit KPDDP yang berlokasi di Makassar dan Jambi.

20

Suka

Bagikan

9

Tweet

G+1

0

Dipakai Bersama

20

Tajuk Pajak

Tingkatkan Partisipasi Amnesti Pajak (/content/article/tingkatkan-partisipasi-amnesti-pajak)

Selasa, 6 Desember 2016 - 16:48



(/content/article/tingkatkan-partisipasi-amnesti-pajak)

Bicara tentang amnesti pajak, bukan hanya soal pencapaian target penerimaan negara, melainkan ingin mencapai tujuan yang lebih besar yaitu untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui repatriasi aset WNI yang tersimpan di luar negeri, serta untuk memperluas basis data pajak yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi sehingga dalam jangka panjang

Selengkapnya (/tajuk-pajak)

Berita



dengan-contoh)

(/content/news/bupati-kuningan-himbau-masyarakat-ikut-amnesti-

Bupati Kuningan Himbau Masyarakat Ikut Amnesti Dengan Contoh (/content/news/bupati-kuningan-himbau-masyarakat-ikut-amnesti-dengan-contoh)



internasional-dengan-topik-%E2%80%9Cinternational)

(/content/news/ditjen-pajak-selenggarakan-seminar-perpajakan-

Ditjen Pajak selenggarakan seminar perpajakan internasional... (/content/news/ditjen-pajak-selenggarakan-seminar-perpajakan-internasional-dengan-topik-%E2%80%9Cinternational)



pengisian-spop)

(/content/news/awali-tahun-pajak-baru-dengan-sosialisasi-

Awali Tahun Pajak Baru dengan Sosialisasi Pengisian SPOP (/content/news/awali-tahun-pajak-baru-dengan-sosialisasi-pengisian-spop)

Selengkapnya (/berita)

Foto



anti-korupsi-di-bumi-sebiduk-semare)

(/content/flash-foto/kpp-lubuk-linggau-sebarkan-semangat-

KPP Lubuk Linggau Sebarkan Semangat Anti Korupsi di Bumi Sebiduk... (/content/flash-foto/kpp-lubuk-linggau-sebarkan-semangat-anti-korupsi-di-bumi-sebiduk-semare)



sentral-buol)

(/content/flash-foto/grebek-simpatik-amnestik-pajak-di-pasar-

Grebek Simpatik Amnestik Pajak di Pasar Sentral Buol (/content/flash-foto/grebek-simpatik-amnestik-pajak-di-pasar-sentral-buol)



bengkulu-dan-lampung)

(/content/flash-foto/mahasiswa-polinela-kunjungi-kanwil-djp-

Mahasiswa Polinela Kunjungi Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung (/content/flash-foto/mahasiswa-polinela-kunjungi-kanwil-djp-bengkulu-dan-lampung)

Selengkapnya (/flash-foto)

Artikel



(/content/article/perlunya-reformasi-pajak)

Perlunya Reformasi Pajak (/content/article/perlunya-reformasi-pajak)



sangat-penting)

(/content/article/kembali-mengingatnkan-mengapa-pajak-itu-

Kembali Mengingatnkan, Mengapa Pajak itu Sangat Penting? (/content/article/kembali-mengingatnkan-mengapa-pajak-itu-sangat-penting)



(/content/article/mengapa-harus-ikut-amnesti-pajak)

Mengapa Harus Ikut Amnesti Pajak? (/content/article/mengapa-harus-ikut-amnesti-pajak)

Selengkapnya (/artikel)

Tokoh

Sisi Lain

Inklusi Kesadaran Pajak

ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN



(http://www.djkn.kemenkeu.go.id/)



(http://beacukai.go.id)



(http://www.djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/)



(http://www.djpk.kemenkeu.go.id/)



(http://www.djpu.kemenkeu.go.id/)



Hak Cipta © Direktorat Jenderal Pajak

Suka Bagikan

Ikuti @DitjenPajakRI